

Pemecah Ombak Pulau Kelapa Rusak Diterjang Banjir Rob

JAKARTA (IM) - Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan perbaikan tanggul pemecah ombak atau yang kerap disebut *breakwater* di Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

Kepala Sudin SDA Kepulauan Seribu, Hendri mengatakan dilakukan pemeliharaan ini karena di beberapa bagian tanggul di sisi utara Pulau Kelapa memerlukan perbaikan akibat terjerangan ombak dan air laut pasang.

"Kami mengerahkan lima personel untuk melakukan perbaikan tanggul, dengan menyusun kembali tanggul beton yang roboh, kemudian mengikatnya menggunakan tali nilon agar lebih kuat," kata Hendri, Minggu (28/5).

Hendri menjelaskan, keberadaan tanggul pemecah gelombang ini sangatlah penting. Hal ini berguna untuk melindungi pantai

dan permukiman warga dari gelombang pasang maupun saat terjadi ombak besar.

Ditambahkannya, panjang tanggul yang diperbaiki mencapai panjang 120 meter dengan lebar tanggul sekitar dua meter. Perbaikan yang dilakukan sejak 22 Mei lalu ditargetkan rampung pada pekan depan.

"Saat ini progres pengerjaannya sudah capai 50 meter atau sekitar 45 persen. Targetnya awal Juni kita selesaikan," tutur Hendri.

Ketua RW 01 Pulau Kelapa, Sobri menyampaikan apresiasi gerak cepat pemerintah dalam menangani perbaikan tanggul di wilayahnya. Menurutnya, kalau *breakwater* tidak diperbaiki maka akan berdampak luas.

"Pekerjaan petugas ini sangat cepat dan rapi, karena jika tidak segera diperbaiki akan berdampak ke pesisir pantai. Diharapkan perbaikan tersebut bisa selesai sesuai targetnya," pungkasnya. ● yan

Ketua RT yang Bongkar Isu Ruko Serobot Bahu Jalan Belum Alami Intimidasi

JAKARTA (IM) - Ketua RT 011/RW 003 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya mengutarakan belum ada intimidasi apapun pasca dirinya mengungkap isu ruko serobot bahu jalan di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Walau begitu, dia ogah mengangkat telepon dari orang tak dikenal.

"Sampai saat ini, saya pribadi belum mengalami intimidasi secara langsung," kata dia, Sabtu (27/5).

Riang adalah orang pertama yang membongkar okupasi jalan dan saluran air oleh pemilik ruko di Jalan Pluit Niaga RT 011/RW 03. Isu ini kemudian ramai diperbincangkan di media massa dan baru menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa pemilik ruko telah membongkar area yang diserobotnya secara mandiri. Sementara belasan bangunan lainnya dibongkar secara paksa oleh petugas pada Rabu, 24 Mei 2023.

Pembongkaran tersebut menuai protes dari pemilik ruko terhadap Riang.

Mereka memasang spanduk bertuliskan kemarahan dan kekecewaan kepada Ketua RT itu. Salah satu spanduk tertera bahwa pemilik UMKM dan karyawan ruko resah sejak Riang sibuk mencari sensasi.

Riang merasa polisi wajib melindungi setiap warganya yang diintimidasi atau diancam. Walau begitu, dia tak mengetahui apakah akan mendapat perlindungan akibat isu ruko serobot bahu jalan.

"Saya selaku warga negara Indonesia memiliki hak atas perlindungan terhadap kehidupan dan

keamanan saya dari pihak kepolisian, baik diminta maupun tidak diminta," ucapnya.

Diberi Hak Sampai Masukan

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan (Sudin Citata) Jakarta Utara, Jogi Harjudanto mengatakan, pihaknya akan mengembalikan fungsi jalan dan saluran air pasca pembongkaran ruko serobot bahu jalan.

"Bahu jalan dan saluran air akan dibuat sebagaimana fungsi awal," kata dia, Sabtu.

Menurut Jogi, pengembalian fungsi seperti mula-mula akan dilakukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Bina marga. Selain itu, pemilik ruko juga diberi hak untuk menyampaikan masukan.

"Pemilik ruko juga punya andil dalam memberikan masukan, terutama dalam hal aksesibilitas dari dan ke rukonya masing-masing," ucapnya.

Jogi menjelaskan, pihaknya telah memeriksa status tanah ruko tersebut dengan mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan peta wilayah melalui situs Jakarta Satu.

Hasilnya bahwa bangunan ruko di Pluit itu dilengkapi dengan lahan parkir. Namun, lahan parkir yang seharusnya dimanfaatkan bersama itu justru diokupasi pemilik ruko dengan cara membangun area baru melampaui hak kepemilikannya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



KIRAB PANCASILA

Warga membawa lambang Garuda Pancasila saat Kirab Pancasila pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/5). Kirab yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila tersebut mengambil tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global.

Plt Wali Kota Bekasi Minta Polisi Usut Pihak yang Mencemoohnya

Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menegaskan, pengusutan secara tuntas diperlukan karena ia menilai ada pihak yang ingin menjatuhkan nama baik dirinya dan juga Pemkot Bekasi. Dia tidak mau berspekulasi lebih lanjut perihal siapa pihak yang meretas *running text* tersebut.

BEKASI (IM) - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto meminta polisi mengusut tuntas pihak yang mencemoohnya melalui peretasan *running text*.

Total, ada dua videotron yang diretas dan menampilkan *running text* bernada

umpatan ke Tri Adhianto.

Videotron yang diretas itu berada di Embarkasi Haji Jakarta-Bekasi serta di RSUD Bantargebang.

"Jadi secara pribadi dan kedinasan saya berharap bahwa hal-hal yang memang tidak dibenarkan secara ketentuan,

bisa dilakukan pengusutan secara tuntas," kata Tri dikutip dari keterangannya, Minggu (28/5).

Tri menegaskan, pengusutan secara tuntas diperlukan karena ia menilai ada pihak yang ingin menjatuhkan nama baik dirinya dan juga Pemkot Bekasi.

Terkait pengusutan tersebut, kata Tri, pihak Embarkasi Haji Jakarta-Bekasi sendiri telah melaporkan dugaan peretasan tersebut ke polisi.

"Hari ini sudah berproses secara hukum, sudah dilaporkan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik," ujar dia.

Selain itu, lanjut Tri, Asrama Haji Embarkasi Jakarta-

Bekasi juga sudah meminta maaf dan memastikan tidak ada unsur kesengajaan.

Dirinya juga tidak mau berspekulasi lebih lanjut perihal siapa pihak yang meretas *running text* tersebut.

"Saya serahkan ke yang berwenang, karena perlu pendalaman barang bukti dan sebagainya," tutur dia.

Sebagai informasi, video yang memperlihatkan *running text* bertuliskan "Plt Wali Kota Bekasi Bobrok" tiba-tiba banyak beredar di media sosial.

Dalam video yang diterima, tampak *running text* itu terlihat di bangunan area halaman depan gedung Embarkasi Haji Jakarta-Bekasi.

Kalimat umpatan yang ditujukan kepada Tri Adhianto

itu juga dilengkapi tiga tanda seru dengan tulisan warna merah.

"PLT WALIKOTA BEKASI BOBROK!!!" demikian kalimat dalam *running text* tersebut.

Tak hanya di Embarkasi Haji Jakarta-Bekasi, umpatan itu juga mendadak muncul di LCD pintu masuk RSUD Bantargebang.

Tulisan *running text* itu juga menampilkan kritik keras ke anggota Satpol PP yakni Eko.

"RAPORT MERAH!!! PLT WALI KOTA BEKASI TRI ADHANTO BOBROK & PECAT POL PP EKO YANG BERTINDAK REPRESIF!!!" demikian tulisan dalam *running text* merah tersebut. ● yan

Juni 2023, Pemprov DKI Bahas FGD Aturan Jam Kerja di Jakarta

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta berencana menentukan jam masuk kantor di Ibu Kota. Hal itu dilakukan untuk menekan angka kemacetan yang semakin meningkat di Jakarta.

Rencana itu akan dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama pihak-pihak terkait. Mulanya, kegiatan FGD itu digelar pada 17 Mei 2023 lalu. Akan tetapi FGD itu urung terjadi.

"Memang tadinya rencananya dilaksanakannya FGD pada tanggal 17 Mei (2023). Kemudian tertunda karena ada kegiatan yang tidak bisa dibatalkan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo,

Minggu (28/5).

Lebih lanjut, Syafrin menjelaskan agenda FGD itu nantinya akan digelar pada 28 Juni 2023 mendatang.

"Diundur pelaksanaannya nanti pada 28 Juni (2023) mendatang," jelas dia.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa Pemprov DKI akan mengajak pihak perkantoran swasta yang berada di kawasan Sudirman-Thamrin hingga asosiasi pemilik gedung untuk melakukan FGD menggodok aturan jam kerja.

"Ya nanti kan pihak swasta kita ajak bicara, pemerintah pusat, kan-

tor-kantor yang di sekitar Sudirman-Thamrin kita ajak ngobrol, asosiasi-asosiasi gedung, mall kita ajak bicara juga," kata Heru Budi kepada wartawan di Pendopo Balai Kota, Jumat (19/5) lalu.

Heru menjelaskan nantinya dirinya sendiri akan membuka FGD tersebut yang juga dihadiri dari berbagai stakeholder. Namun, Kepala Sekretariat Presiden itu tidak menjelaskan secara rinci kapan akan dilaksanakan FGD itu.

"FGD nanti, FGD kan nanti di Borobudur (hotel) dengan semua pihak, lapisan masyarakat. nanti saya yang buka," pungkasnya. ● yan

MOMENTUM JAKARTA JADI KOTA RAMAH LINGKUNGAN Pj Gubernur DKI Tegak Lurus Bongkar Ruko Niaga Pluit

JAKARTA (IM) - Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengapresiasi ketegasan Pj Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah membongkar deretan Ruko Niaga di daerah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara sebab menyerobot bahu jalan.

"Pak Heru telah tegas dalam hal ini, siapa yang melanggar patut untuk ditertibkan. Ini menjadi tauladan yang harus diikuti oleh seluruh jajarannya dalam menegakkan aturan di DKI Jakarta," ucapnya.

William juga berharap ketegasan Pemprov DKI tidak berhenti pada penertiban Ruko di Pluit, tapi juga pada seluruh kawasan yang telah melanggar aturan seperti menutupi fasilitas umum (fasum).

"Kejadian ini mestinya jadi momentum Pemprov DKI mulai menyisir tempat-tempat yang serupa seperti di Pluit. Menertibkan bangunan yang telah melanggar aturan, membuat Jakarta menjadi Kota yang tertib, bersih dan ramah lingkungan," ungkapnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga berharap Heru Budi harus bekerja tegak lurus tanpa terikat pada aturan apapun.

Dia juga harus mendelegasikan tugas ini kepada seluruh wali kota untuk menegakkan aturan yang sama tanpa standar ganda.

"Pemkot harus diberi tugas, dan mereka harus bisa menyisir di setiap wilayahnya dan mencari bangunan yang menyalahi aturan. Kalau ditemukan,

harus segera dibongkar," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI itu telah menurunkan 200 personel untuk melakukan pembongkaran bangunan 22 ruko di RT 011 RW 03, Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Jakarta Utara pada Rabu (24/5) lalu.

Puluhan pemilik ruko itu menggunakan lahan parkir, saluran air hingga sebagian bahu jalan untuk memperluas teras ruko. Mereka memasang meja dan kursi di bagian itu untuk tempat makan pengunjung.

Penutupan saluran air dan bahu jalan itu ditinggalkan sebagai penyebab banjir saat hujan karena genangan air tidak bisa masuk ke got.

Pembongkaran dilakukan setelah Pemkot Jakarta Utara memberikan tenggat waktu empat hari bagi pemilik ruko serobot bahu jalan untuk membongkar sendiri.

Arifin menerangkan, pembongkaran ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan saluran air sebagaimana mestinya.

"Yang penting apa yang tadi disampaikan bahwa pengembalian fungsi terhadap fungsi saluran begitu besar, ya yang jalan bisa berfungsi sebagai jalan," ungkapnya.

Total ada 22 ruko di Pluit yang dibongkar. Meski begitu, Arifin tidak memungkir jika nanti akan ada penambahan jumlah ruko yang dibongkar.

"Ya penyesuaian terhadap kondisi yang ada di sana aja," kata Arifin. ● yan

FOTO: ANTARA



PAMERAN 25 TAHUN REFORMASI DI FIB UI

Pengunjung melihat beragam seni grafis dan tulisan saat pameran 25 Tahun Reformasi Suara Kampus Sastra di FIB UI, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/5). ILUNI FIB melalui kelompok kerja (pokja) menggelar pameran 25 Tahun Reformasi dengan tema Suara Kampus Sasatra yang menampilkan beragam memorabilia gerakan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia seperti foto, karikatur, puisi dan seni grafis.

PT. REDECO PETROLIN UTAMA
OIL AND CHEMICAL STORAGE TERMINAL
www.redeco-rpu.com

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN PT REDECO PETROLIN UTAMA

Sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ini direksi PT Redeco Petrolin Utama ("Perseroan") mengumumkan bahwa pengambilalihan Perseroan oleh PT Chandra Daya Investasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023.

Jakarta, 29 Mei 2023
Direksi
PT Redeco Petrolin Utama

PENGUMUMAN

Kami, Direksi PT Hanoman Sakti Pratama, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 26 Mei 2023, para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut:

Menyetujui untuk mengeluarkan saham baru Perseroan sebanyak 6.868 (enam ribu delapan ratus enam puluh delapan) lembar saham yang akan diambil bagian oleh PT Maheswara Pradana Abhinaya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan cara konversi utang Perseroan kepada Pemegang Saham.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 PFP No 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 29 Mei 2023
Direksi Perseroan